

## ***ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai Respon akan Kehadiran The Quadrilateral Security Dialogue di Kawasan Indo-Pasifik***

Vincensius Dion P. Ginting<sup>1</sup>, Khairunnisa Simbolon<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia, khairunnisa.simbolon@fisip.unila.ac.id

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi respon dan reaksi Indonesia terhadap kehadiran Quadrilateral Security Dialogue (QSD) di kawasan Indo-Pasifik. Fenomena pembentukan dan transformasi kerjasama QSD dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik menimbulkan berbagai reaksi dan asumsi dari berbagai negara-negara di kawasan Indo-Pasifik khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Menanggapi situasi tersebut, Indonesia melalui ASEAN pada KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 2019, memperkenalkan visi ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai sebuah visi dan pedoman bersama bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri untuk menelusuri motif respon Indonesia terhadap QSD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ASEAN Outlook on Indo-Pacific akan digunakan sebagai sebuah upaya untuk turut menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan dan kesejahteraan, demikian pula bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tetapi dalam realisasinya, ASEAN Outlook on Indo-Pacific masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi dalam ranah internasional seperti salah satunya adalah akomodasi kepentingan masing-masing negara di kawasan Indo-Pasifik.*

***Kata Kunci:*** ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Indo-Pasifik, ASEAN, Quadrilateral Security Dialogue (QSD), Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri.

### ***Abstract***

*This study is supposed to identify Indonesia's responses and reactions to the presence of the Quadrilateral Security Dialogue (QSD) in the Indo-Pacific region. The phenomenon of establishing and transforming QSD cooperation in the dynamics of the Indo-Pacific region has caused various reactions and assumptions from various countries in the Indo-Pacific region, especially in the Southeast Asia Region. In response to the situation, Indonesia through ASEAN at the ASEAN Summit in Bangkok in 2019, introduced the vision of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific as a common vision and guideline for countries in the Indo-Pacific region. This research uses descriptive qualitative methods using the concepts of national interest and foreign policy. The results showed that the presence of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific will be used as an effort to help maintain the stability of the Indo-Pacific region which is a prerequisite for achieving growth and prosperity, as well as for other ASEAN member states. But in its realization, the ASEAN Outlook on Indo-Pacific still has many challenges that must be faced in the international realm, one of which is the accommodation of the interests of each country in the Indo-Pacific region.*

***Keywords:*** ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indo-Pacific, Indonesia, ASEAN, Quadrilateral Security Dialogue, National Interest, Foreign Policy.

## Pendahuluan

Indo-Pasifik adalah pengertian geografis terhadap kawasan yang mencakup Laut Hindia dan Pasifik (Khurana, 2007). Istilah ini diucapkan Shinzo Abe di depan parlemen India, menggambarkan “the confluence of the two seas” untuk membangun kerjasama dalam membangun kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Anwar, 2020). Kawasan Indo-Pasifik menggambarkan kompleksitas kawasan yang memiliki nilai geopolitik yang strategis. Terciptanya sistem interaksi kompleks yang dipicu oleh adanya tren interaksi ekonomi dan keamanan sangat mempengaruhi dinamika geopolitik Indo-Pasifik serta negara-negara yang berada di dalam kawasan tersebut. Kawasan Indo-Pasifik dikenal sebagai kawasan yang sangat dinamis dan rentan terhadap konflik antar negara yang berada dalam kawasan tersebut. Kepentingan masing-masing negara menjadi dasar yang dapat menyebabkan konflik terutama apabila kepentingan tersebut tidak sejalan dan saling berbenturan dan berbuntut pada persaingan antar negara dalam kawasan. Persaingan ini menyebabkan adanya kecenderungan bagi negara-negara tersebut untuk membentuk relasi dengan negara-negara lain dengan diplomasi persamaan kepentingan yang didasarkan oleh *common interest* maupun *common enemy*. Kerjasama antar negara di kawasan Indo-Pasifik sering sekali dilakukan untuk meredam dan mencegah konflik yang mungkin terjadi dengan berdasarkan asas liberalisme interdependensi dan institusionalis. Forum-forum dialog dan diskusi strategis antar negara sudah dibentuk dengan kesepakatan negara-negara yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik (Sinta Herindrasti, 2019).

Salah satu contoh nyata dari sebuah kerjasama tersebut adalah bangkitnya QSD. QSD merupakan salah satu aliansi kawasan yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India. QSD adalah dialog yang melibatkan pengaturan diplomatik dan militer, diprakarsai pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dari Jepang, dengan dukungan Wakil Presiden Dick Cheney dari Amerika Serikat, Perdana Menteri John Howard dari Australia, dan Perdana Menteri Manmohan Singh dari India (Rai, 2018). Kerjasama QSD pada awalnya terbentuk sebagai kerjasama keempat negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India sebagai respon daripada kejadian bencana Tsunami Samudera Hindia pada tahun 2004. Pada awalnya kerjasama quadilateral ini hanya bersifat kondisional dan sementara, namun Jepang menginginkan untuk memperpanjang nilai-nilai yang berhasil dibangun melalui kerjasama ini untuk menciptakan suatu prinsip kebebasan, kemakmuran dan kesejahteraan regional Asia Pasifik dan Indo Pasifik (Envall, 2019).

Kehadiran dialog ini menjadi momentum kolaborasi antara empat negara besar yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India yang tersebar di sudut-sudut strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dalam transformasinya yang terjadi pada tahun 2017, QSD membawa misi untuk menanamkan prinsip kebebasan, kemakmuran, dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Konsep free and open Indo-Pacific merupakan sebuah konsep yang ingin dipromosikan negara-negara anggota QSD untuk menjadi prinsip dan gambaran kawasan Indo-Pasifik. Konsep ini didasari oleh sinkronisasi masing-masing kepentingan negara anggota QSD.

Fenomena pembentukan dan transformasi kerjasama *QSD* dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik menimbulkan berbagai reaksi dan asumsi dari berbagai negara-negara di kawasan Indo-Pasifik khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian yang berjudul *Southeast Asian Perception of The Quadrilateral Security Dialogue* tahun 2018, kehadiran *The Quad* memicu peningkatan aktivitas negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dalam berdinamika. *Quad* dinilai akan menghadirkan stabilitas kawasan yang berbasis norma & aturan. Kehadiran *the Quad* dipandang penting untuk menciptakan

perimbangan kekuatan atas agresivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik khususnya yang melibatkan sengketa-sengketa dan konflik wilayah (Le Thu, 2018). Fenomena pembentukan *QSD* tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Indonesia. Dalam beberapa laporan menyebutkan bahwa, Indonesia berharap kehadiran *QSD* dalam kontestasi Kawasan Indo-Pasifik dapat mengakomodasi segala arah kepentingan dari seluruh negara di Kawasan terutama dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia nilai-nilai *free and open Indo-Pacific* diharapkan memiliki keselarasan dan sejalan dengan kepentingan ASEAN di Kawasan Indo- Pasifik.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat mendeskripsikan posisi dan tanggapan Indonesia terhadap fenomena pembentukan *QSD* di Kawasan Indo-Pasifik dengan mengeksplorasi dan menganalisa kepentingan luar negeri dan domestik Indonesia, berdasarkan konsep kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil olahan penelitian sebelumnya. Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti perjanjian, deklarasi dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Republik Indonesia (<https://kemlu.go.id/portal/id>) dan website ASEAN (<https://asean.org/>).

### Hasil dan Pembahasan

Adanya fenomena interaksi keamanan dan ekonomi serta dinamika politik di kawasan Indo-Pasifik yang diikuti dengan transformasi *QSD* pada tahun 2017 cenderung menimbulkan berbagai respon dari negara-negara yang berada di kawasan Indo- Pasifik. Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang berada di kawasan Indo- Pasifik turut memberikan tanggapan terhadap situasi yang sedang terjadi di kawasan Indo- Pasifik. Kehadiran *QSD* dalam kontestasi politik di kawasan Indo- Pasifik membawa sebuah konsep *free and open Indo-Pacific*. Konsep ini juga menimbulkan berbagai respon baik positif maupun negatif oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Melihat konsep *free and open Indo-Pacific* melibatkan QUAD, ada beberapa asumsi yang menyebutkan bahwa konsep tersebut memiliki kesamaan kepentingan dalam melihat sikap dan pergerakan China dan dinilai akan menimbulkan gesekan kepentingan antar negara khususnya negara- negara *QSD* dan China yang memungkinkan terjadinya konflik.

Dinamika politik yang labil dan kompleks, membuat Indonesia sulit memprediksi strategi dan kebijakan yang dapat menyeimbangkan ketidakstabilan dan menyesuainya. Indonesia menilai fenomena ini tidak akan diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan untuk memakai pendekatan *'One Size Fit All* untuk menciptakan tatanan kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan satu visi-misi, di mana pendekatan bisa mencakup semua aspek dan mengikat negara menjadi satu, serta mengesampingkan kepentingan nasionalnya. Pendekatan tersebut diharapkan akan membawa negara dalam kerja sama yang selalu menciptakan kepentingan bersama sejalan dengan kepentingan negara masing-masing.

Pada forum KTT ASEAN ke-34 di Bangkok pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia melalui ASEAN mempromosikan konsep *free and inclusive Indo-Pacific* dalam dokumen *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (Kemlu.go.id, 2019). AOIP akan digunakan sebagai sebuah pandangan dan arah kebijakan ASEAN yang dirumuskan oleh Indonesia melalui ASEAN yang akan digunakan sebagai pedoman negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Secara garis besar, AOIP bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik ditengah dinamika dan persaingan politik dan ekonomi di kawasan

Indo-Pasifik (Kemlu.go.id, 2019).

AOIP pada dasarnya akan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ASEAN yang kemudian akan dilemparkan menuju kawasan Indo-Pasifik agar tercipta kestabilan dan perdamaian di kawasan tersebut layaknya yang terjadi di ASEAN. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya *hagemony* oleh negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik dengan mengutamakan konsep *balance of power* untuk kemakmuran dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kesenjangan yang terjadi antara dunia barat dengan negara-negara di ASEAN menyebabkan minimnya kepercayaan negara-negara besar di dunia terhadap ASEAN. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia melalui ASEAN ini diharapkan menjadi sebuah bentuk pencegahan serta perencanaan untuk membendung berbagai kepentingan nasional yang dapat menimbulkan konflik di kawasan Indo-Pasifik.

Setiap negara di kawasan Indo-Pasifik, memiliki kepentingan mereka sendiri baik itu yang didasarkan pada kebijakan luar negeri masing-masing negara ataupun kepentingan yang didasarkan pada aliansi dan regionalisme negara-negara tersebut. Melalui AOIP, Indonesia memiliki kepentingan untuk mencegah kemungkinan terjadinya dampak terburuk bagi ASEAN khususnya dan bagi Indo-Pasifik secara umum. Indonesia ingin menerapkan prinsip-prinsip *Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN)* dan *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)* di kawasan Indo-Pasifik dengan menempatkan ASEAN sebagai *leader* dan *dealer* di kawasan Indo-Pasifik. Sikap Indonesia ini dapat dipahami sebagai ketidakinginan akan terbentuknya polaritas di kawasan yang sudah menikmati perdamaian selama hamper 10 dekade ini. Netralitas Indonesia yang dianggap sebagai leader ASEAN ini sangat diperlukan untuk membendung terbentuknya polaritas antara AS dan Cina (Anwar, 2020).

AOIP memiliki visi untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Atas dasar kebutuhan kerjasama ekonomi dan interdependensi antar negara akan menyebabkan suatu negara mengalami kecenderungan menjadi rasional. Rasionalitas tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi wilayah dengan kemampuan negara untuk mencapai kepentingan tersebut. Hal tersebut dinilai dapat meredam ego-sentrisme negara-negara di Indo-Pasifik. Asumsi menahan diri, di mana negara dapat menahan dan mengontrol kepentingannya dengan menggunakan pemikiran rasional. Pengorbanan yang dilakukan oleh negara atas dasar rasionalitas tersebut akan mendorong tercapainya kepentingan bersama dan entitas kawasan. Indonesia, dalam hal ini berupaya tetap mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari persaingan dua kubu, namun disisi lain juga berupaya mempertahankan prospek perdamaian kawasan kedepannya. Alih-alih memihak pada satu sisi, Indonesia memilih untuk tetap netral dan merangkul kedua kubu. AOIP dianggap sebagai tanda dari determinasi ASEAN untuk merespon Indo-Pasifik dengan berfokus pada netralitas ((Singh & Tsjeng, 2020).

Pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia dalam dokumen AOIP Indonesia sebagai pengarah sekaligus pemimpin dalam merumuskan kebijakan tersebut memiliki prinsip yaitu '*Open*' dan '*Inclusive*' (ASEAN.ORG, 2019). Tujuan yang diharapkan dalam pembentukan kebijakan ini adalah untuk menguatkan hubungan antara negara anggota ASEAN dengan negara disekitar Indo-Pasific. Kebijakan ini diberlakukan dan dikhususkan untuk wilayah Indo-Pasifik, karena merupakan wilayah atau perairan jalur perdagangan yang sangat padat dan merupakan jalur pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang dilewati jalur tersebut . oleh karena itu, sebagai wilayah yang cukup padat sering terjad konflik baik konflik regional atau negara-negara yang ikut berpartisipasi di wilayah tersebut. Deklarasi AOIP ini dicetuskan dengan harapan untuk dapat menghadapi tantangan dan meminimalisir isu global yang akan terjadi di Indo-Pasifik. Selain itu juga menjadi acuan bagi negara-negara anggota ASEAN

untuk tidak berpihak pada kekuatan besar manapun yang berupaya mencari pengaruh di Indo-Pasifik (Hoang, 2019)

Fokus utama ASEAN yang diprakarsai oleh Indonesia ini adalah langkah tegas ASEAN di tengah menguatnya rivalitas antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik pasca kehadiran QSD (Oktaviano, 2020). Indonesia melalui ASEAN menegaskan posisi untuk tidak akan memihak kepada salah satu kekuatan besar manapun dalam persaingan mereka di kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia (Weatherbee, 2019). Indonesia memandang kedua kawasan ini sebagai kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi. Rivalitas berbagai kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas kawasan dan meluas menjadi persaingan di berbagai sektor lainnya. Indonesia ingin menghadapi kondisi ini dengan meredam dan menghindari sikap saling tidak percaya yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan kondisi *zero-sum game*.

Deklarasi AOIP pada KTT ASEAN ke-34 yang lalu merupakan titik penting bagi perkembangan ASEAN. Dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari rivalitas antara dua negara yang berpengaruh di Indo-Pasifik menjadi tidak terhindarkan, termasuk bagi Indonesia. Indo-Pasifik disebut menjadi sentral perebutan pengaruh kekuatan besar antara China dan Amerika Serikat, serta kekuatan besar lainnya yang juga berkepentingan. Bagi Indonesia, adopsi dokumen AOIP ini adalah upaya untuk turut menjaga stabilitas kawasan yang merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan dan kesejahteraan, demikian pula bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya (Kemlu.go.id, 2019). Sebagai salah satu organisasi regional terbesar, ASEAN secara konsisten berusaha menjaga peran sentralnya dalam mengelola persoalan kawasan, dan dokumen ini merupakan wujud nyata upaya ASEAN ke arah itu. Kejelasan pendekatan AOIP terhadap Indo-Pasifik dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan regional lainnya untuk kalkulasi dan menyusun strategi masing-masing, serta mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan kerangka kerja sama yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.

Kepentingan negara-negara terutama yang berada di kawasan Indo-Pasifik menjadi tantangan utama bagi implementasi AOIP. Setiap negara di kawasan Indo-Pasifik, memiliki kepentingan mereka sendiri baik itu yang didasarkan pada kebijakan luar negeri masing-masing negara ataupun kepentingan yang didasarkan pada aliansi dan regionalisme negara-negara tersebut. AOIP ini sendiri juga berisi kepentingan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan peran ASEAN dalam percaturan politik internasional. Ketika AOIP dirumuskan, terdapat benturan dengan yang konsep yang disampaikan oleh *Quadrilateral Security Dialogue* mengenai Indo-Pasifik. Benturan kebijakan ini terlihat pada poin utama dari kedua konsep yaitu “free” yang dibawa oleh QSD dan “inklusif” yang dibawa oleh AOIP (ASEAN.ORG, 2019)

Terdapat berbagai asumsi yang menyebutkan bahwa konsep “free” yang dibawa oleh QSD ini menyangkut kepentingan Amerika Serikat dan Negara-negara anggota QSD lainnya dalam mengikis pengaruh dan membatasi kebijakan geopolitik dan geostrategis China di kawasan Indo-Pasifik. Konsep “free” yang dibawa oleh Amerika Serikat dinilai dapat ditafsirkan sebagai kesempatan bagi negara-negara untuk bebas melakukan intervensi kepada negara lain. Konsep tersebut sangat bertentangan dengan prinsip ASEAN yang juga dimuat dalam *AOIP*. Konsep “inklusivitas” berarti mengajak semua negara untuk terlibat dalam sistem kerjasama di kawasan Indo-Pasifik tetapi berada dalam posisi yang sejajar. Melalui nilai tersebut, ASEAN terutama Indonesia ingin mengajak seluruh negara terutama di kawasan Indo-Pasifik untuk terlibat dalam kerjasama tersebut berlandaskan dokumen *AOIP*. Untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya, diplomasi menjadi alat yang digunakan oleh

Indonesia. Melalui diplomasi tersebut diharapkan terjadi dialog kepentingan dengan negara-negara lainnya sehingga setiap negara dapat mengakomodasikan kepentingan negaranya berlandaskan *AOIP*. Indonesia secara aktif mendorong dialog yang mengedepankan keikutsertaan seluruh aktor tanpa terkecuali dan memilih ASEAN sebagai wadahnya Hal ini menunjukkan ekspektasi yang disematkan kepada Indonesia sebagai “pemimpin” ASEAN (Agastia, 2020)

Tantangan selanjutnya adalah upaya realisasi *AOIP* bersifat kontemporer. Pelemparan *AOIP* menuju ranah internasional terjadi pada konteks perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Perang dagang tersebut menimbulkan dan meningkatkan tensi dan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik terutama hubungan China dengan Amerika Serikat. Kondisi tersebut juga memengaruhi perekonomian kawasan Indo-Pasifik karena pengaruh yang dimiliki oleh kedua negara baik Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik. Melihat kondisi tersebut, *AOIP* harus bertindak sebagai hal yang mampu menetralsisir serta meredakan tensi dan ketegangan yang ada agar tidak berdampak buruk pada kawasan Indo-Pasifik. Ditengah kondisi tersebut, *AOIP* harus mampu memposisikan diri agar tidak menimbulkan tafsiran baru seakan-akan menjadi perpanjangan kepentingan satu atau dua negara. Pemikiran ini timbul dari tidak adanya respon daripada China terkait benturan kebijakan antara *AOIP* dengan kepentingan Amerika Serikat sehingga dapat memunculkan indikasi bahwa *AOIP* terkesan mendukung China. Selain itu, respon India yang merupakan negara yang terancam oleh manuver kebijakan luar negeri China yang mengadopsi prinsip keduanya yaitu kebijakan *AOIP* dan Amerika Serikat akan menambah ketegangan kawasan Indo-China. Kondisi ini dapat menimbulkan indikasi bahwa terjadi persaingan antara kedua blok yakni China versus AS-India.

Sebagai kawasan regional yang memiliki letak yang dinamis dalam dunia internasional, ASEAN memiliki kepentingan untuk membentuk sebuah struktur ekonomi serta keamanan kawasan yang baik guna memastikan bahwa dinamika dalam dunia internasional akan terus membawa tentang perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat di Asia Tenggara serta di wilayah Asia-Pasifik atau yang sekarang lebih dipusatkan menjadi wilayah Indo-Pasifik. Dalam pembentukan kebijakan ini Indonesia melalui ASEAN juga ingin membantu mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini dalam menghadapi tantangan bersama, menjunjung tinggi arsitektur regional berbasis aturan dan mempromosikan lebih dekat kerjasama ekonomi, dan dengan demikian dapat memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap ASEAN.

Pengembangan kekuatan ASEAN di dalam regional Indo-Pasifik sangat diharapkan terjadi setelah adanya deklarasi kebijakan ini. Sebagai regionalisme di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara di ASEAN menginginkan untuk lebih mengoptimalan peran ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik. Dalam beberapa dekade terakhir ASEAN telah berkomitmen untuk membangun wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya untuk menjadi sebuah kawasan yang strategis serta menghindari konflik yang terjadi di kawasan. Maka dari itu diperlukan kepemimpinan kolektif dalam menempah dan membentuk visi untuk kerja sama yang lebih erat di Indo-Pasifik dan untuk terus mempertahankan peran sentralnya di dalam regional yang berkembang di Asia Tenggara dan daerah sekitarnya. Pengajuan dokumen *AOIP* kepada dunia internasional merupakan suatu hal yang tidak mudah. Hal ini disebabkan *AOIP* memiliki tantangan tersendiri agar mendapat dukungan dan diakui sebagai salah satu landasan dan prinsip bagi negara-negara di Indo-Pasifik. Perbedaan kepentingan negara, stabilitas, regionalisme, dan perang dagang merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan *AOIP*.

Ini hal yang menjadi tantangan Indonesia untuk menawarkan pola kerjasama kawasan dalam  
JHII | Vol. 5 | No. 1 | 2023

prinsip *AOIP*. Kerjasama antar negara di kawasan Indo- Pasifik yang setara tanpa adanya konsep *big power* atau *super power* dinilai akan menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-pasifik. Pola kerjasama *AOIP* yang ditawarkan juga harus bersifat *positive sumgame* agar tercapainya sebuah interdependensi yang akan menciptakan konektivitas dan kemakmuran bagi negara-negara di kawasan tersebut. Diplomasi dan dialog antar negara di kawasan Indo-Pasifik harus menjadi alat utama dalam sosialisasi dan penawaran kebijakan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* ini kepada dunia guna mendapat simpati dan dukungan dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang notabene merupakan negara-negara yang sangat membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan masing-masing. Indikasi adanya intervensi dan pendekatan militer harus dihindarkan melalui konsep *balance of power* untuk menjaga stabilitas kawasan dan tidak menimbulkan kondisi ketidakpastian bagi negara-negara di kawasan.

Kesepakatan yang bersifat deklarasi harus ditandatangani oleh negara-negara kawasan Indo-Pasifik guna mengontrol dan mengatur perilaku negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan tersebut juga diharapkan diratifikasi oleh setiap negara yang menandatangani atau bahkan seluruh negara di dunia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan sesuai dengan konsep perimbangan kekuasaan tanpa adanya hegemony yang berasal dari salah satu negara. Sebagai regional yang memiliki letak yang dinamis dalam dunia internasional, ASEAN memiliki kepentingan untuk membentuk sebuah struktur ekonomi serta keamanan yang baik guna memastikan bahwa dinamika dalam dunia internasional akan terus membawa tentang perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat di Asia Tenggara serta di wilayah Asia-Pasifik atau yang sekarang lebih dipusatkan menjadi wilayah Indo-Pasifik.

Dalam pembentukan kebijakan ini ASEAN juga ingin membantu mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini dalam menghadapi tantangan bersama, menjunjung tinggi arsitektur regional berbasis aturan dan mempromosikan lebih dekat kerjasama ekonomi, dan dengan demikian dapat memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara untuk menghimpun dukungan dari negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Hal itu dikarenakan kapabilitas dan pengaruh Indonesia yang belum cukup untuk menggalang dukungan negara-negara terkait untuk ikut dalam implementasi norma dan prinsip *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* di kawasan Indo-Pasific.

ASEAN secara umum memiliki nilai tersendiri yang secara kolektif terbangun secara alami oleh perilaku dan interaksi negara-negara anggota dalam dunia internasional. Indonesia dan ASEAN harus mampu bekerjasama dan memperoleh dukungan dari negara-negara di Indo-Pasifik untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik dengan berlandaskan *zone of peace, freedom and neutrality* (ZOPFAN) dan kawasan bebas penggunaan senjata nuklir sesuai dengan prinsip *South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) yang berhasil diterapkan di ASEAN sekaligus mencegah ancaman yang dapat timbul di masa depan sebagai akibat dari persaingan di Indo-Pasifik.

Negara-negara di Indo-Pasifik dapat mencerminkan keberhasilan ASEAN dalam membentuk regionalisme berdasarkan kesatuan entitas. Ketika kesepakatan tercapai satu ukuran cocok untuk semua, yang terakhir dilakukan adalah menghasilkan regulasi atau deklarasi yang mengikat yang mengontrol perilaku negara-negara di Indo-Pasifik. Deklarasi tersebut sangat diperlukan sebagai dasar untuk mengatur negara-negara di Indo-Pasifik dan memastikan keberlangsungan pendekatan *one size fit all*.

Deklarasi tersebut juga dapat dikembangkan menjadi regionalisme baru untuk lebih memastikan keberlanjutan dan keberhasilan satu ukuran yang cocok untuk semua dalam kerangka Indo-Pasifik. Akan tetapi, keterlibatan konstruktif harus diupayakan oleh semua negara di kawasan dengan kesesuaian untuk stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran tanpa hegemoni sepihak.

## KESIMPULAN

Indonesia mengusulkan untuk memakai pendekatan *'One Size Fit All'* untuk menciptakan tatanan kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan satu visi-misi, di mana pendekatan bisa mencakup semua aspek dan mengikat negara menjadi satu, serta mengesampingkan kepentingan nasional masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan akan membawa negara dalam kerja sama yang selalu menciptakan kepentingan bersama sejalan dengan kepentingan negara masing-masing. Indonesia melalui ASEAN mempromosikan konsep *free and inclusive Indo-Pacific* dalam dokumen *AOIP*.

*AOIP* akan digunakan sebagai sebuah pandangan dan arah kebijakan ASEAN yang dirumuskan oleh Indonesia melalui ASEAN yang akan digunakan sebagai pedoman negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Melalui konsep *AOIP* ini, Indonesia melalui ASEAN menegaskan posisi untuk tidak akan memihak kepada salah satu kekuatan besar manapun dalam persaingan mereka di kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia memandang kedua kawasan ini sebagai kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi. Bagi Indonesia, adopsi dokumen *AOIP* ini adalah upaya untuk turut menjaga stabilitas kawasan yang merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan dan kesejahteraan, demikian pula bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Penerapan *AOIP* tentu saja tidak mudah. Masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara di Indo-Pasifik khususnya Indonesia dan ASEAN dalam menciptakan tatanan yang bisa diterima oleh semua negara demi stabilitas, perdamaian, konektivitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa tantangan tersebut antara lain kepentingan negara-negara di Indo-Pasifik serta sikap dan sifat sebuah negara yang cenderung akan mengedepankan kepentingan mereka terlebih dahulu atau egosentrisme.

## Referensi

- Agastia, I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 7(3), 293–305. <https://doi.org/10.1002/app5.308>
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111–129. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>
- ASEAN.ORG. (2019). "ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC."
- Envall, H. D. P. (2019). The Quadrilateral Security Dialogue: Towards An Indo-Pacific Order. *S. Rajaratnam School of International Studies*, September, 1–11. <https://www.csis.org/analysis/quadrilateral-security-dialogue-and-maritime-silk-road-initiative>
- Hoang, T. H. (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Old Wine in New Bottle? *Perspective*, 51, 1–6. [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2019\\_51.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_51.pdf)
- Kemlu.go.id. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Disepakati pada KTT ASEAN ke-34*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/395/berita/asean-outlook-on-the-indo-pacific-disepakati-pada-ktt-asean-ke-34#!>

- Khurana, G. S. (2007). Security of sea lines: Prospects for india-japan cooperation. *Strategic Analysis*, 31(1), 139–153. <https://doi.org/10.1080/09700160701355485>
- Le Thu, H. (2018). *Southeast Asian perceptions of the Quadrilateral Security Dialogue: Survey findings. October*, 1–38.
- Oktaviano, D. (2020). Indonesia Defense Strategy Towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). *International Affairs and Global Strategy*, 80, 21–29. <https://doi.org/10.7176/iags/80-04>
- Rai, A. (2018). Quadrilateral Security Dialogue 2 (Quad 2.0) – a credible strategic construct or mere “foam in the ocean”? *Maritime Affairs Journal of the National Maritime Foundation of India*, 14(2). <https://doi.org/10.1080/09733159.2019.1572260>
- Singh, B., & Tsjeng, H. Z. (2020). ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Seizing the Narrative? *RSIS Commentary*, 016. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2020/01/CO20016.pdf>
- Sinta Herindrasti, V. L. (2019). Fenomena Indo-Pasifik Dan Diplomasi Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 43–51. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/download/965/856/>
- Weatherbee, D. E. (2019). *Singapore | 7 June 2019 Indonesia , ASEAN , and the Indo-Pacific Cooperation Concept*. 47, 1–9.

